

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN¹ (Studi Evaluasi di Delapan Daerah Indonesia)

Drs. B. Mujiyadi, MSW²

ABSTRAK

Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) merupakan penelitian studi evaluasi yang bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi implementasi kebijakan P2FM di lapangan, baik proses pelaksanaan maupun kinerja pelaku program; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan P2FM; (3) Mengidentifikasi hasil capaian P2FM; dan (4) Mengidentifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi P2FM.

Penelitian ini mengambil sampel di delapan daerah provinsi di Indonesia (daerah terpencil, perdesaan, pinggiran kota, perkotaan, pantai, pinggiran hutan, wilayah perbatasan, dan wilayah industri), yaitu: Sawahlunto (Sumatera Barat), Bintan (Riau Kepulauan), Bengkulu Utara (Bengkulu), Majalengka (Jawa Barat), Rembang (Jawa Tengah), Tulung Agung (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Bellu (Nusa Tenggara Timur). Data dan informasi digali dengan studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan *Focus Group Discussion*. Sedangkan teknik analisis data untuk tujuan penelitian pertama dan kedua digunakan teknik analisis kualitatif yang diolah berdasarkan kategori data yang selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ketiga digunakan teknik analisis kuantitatif untuk mengetahui sejauh mana P2FM dilaksanakan, yang mencakup kondisi awal dan *output* dari perkembangan KUBE, perkembangan LKM, dan kondisi kesejahteraan sosial fakir miskin.

Analisis penelitian menggunakan pendekatan *Logical Framework Analysis*, yang mengaitkan hubungan di antara berbagai komponen, yang meliputi: masukan (*inputs*), proses (*processes*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak yang dihasilkan (*impacts*). Untuk itu, ada 5 komponen kunci dalam penelitian ini, yaitu: modal, keterampilan melalui pelatihan, komitmen, pemahaman tentang masyarakat, dan pemasaran belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan

¹ Diangkat dari hasil penelitian Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Studi Evaluasi di Delapan Daerah di Indonesia, dengan anggota tim: Drs. M. Rondang Siahaan, M.Si dan DR. Harry Hikmat, M.Si (Konsultan), Drs. B. Mujiyadi, MSW (Ketua), Dr. Joyakin Tampubolon, M.Si, Drs. Agus Budi Purwanto, Drs. Setyo Sumarno, Drs. Mangara Simanjuntak, M.Si, Dra. Endang Kironosasi, M.Si, Muslim Sabarisman, AKS

² B. Mujiyadi, Peneliti Muda pada Puslitbang Kessos, Departemen Sosial RI

karena pemberdayaan yang dilakukan belum dapat dirasakan manfaatnya secara ekonomi dan belum dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Akan tetapi, manfaat nonekonomi sudah dapat dirasakan oleh anggota KUBE, seperti adanya tabungan di masa yang akan datang. Sebagian anggota KUBE melihat bahwa status sosial mereka meningkat, karena memiliki ternak kambing atau sapi yang selama ini mereka harapkan.

Berdasarkan analisis di atas dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan yang dilakukan sudah dapat dikatakan berhasil, karena anggota KUBE merasa status sosialnya meningkat, yang berarti keberhasilan aspek sosialnya sudah terlihat, walaupun berdasarkan pendekatan *Logical Framework Analysis*, keberhasilan ekonomi masih belum dapat dibuktikan.

Untuk melihat kemungkinan pengembangan konsep pemberdayaan ini di masa yang akan datang, peneliti mencoba menganalisis melalui analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan KUBE yang dapat dikembangkan, kelemahan yang harus diperbaiki, peluang yang dapat menjadikan KUBE lebih berhasil, dan ancaman yang mungkin terjadi. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan rekomendasi untuk diadakan langkah lanjutan, berupa penelitian eksperimentasi melalui uji coba laboratorium kesejahteraan sosial dengan dua alternatif.

Kata Kunci:

Program Pemberdayaan, Fakir Miskin, Evaluasi.

Pendahuluan

Walaupun Indonesia sudah merdeka, namun ternyata masih banyak warganya yang mengalami kemiskinan. Untuk itu, pemerintah mencanangkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM).

Permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah: (1) Apakah proses pelaksanaan maupun kinerja pelaku program P2FM sesuai dengan panduan yang ada? (2) Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan P2FM? (3) Bagaimana hasil capaian P2FM? dan (4) Bagaimana efektivitas dan efisiensi P2FM?

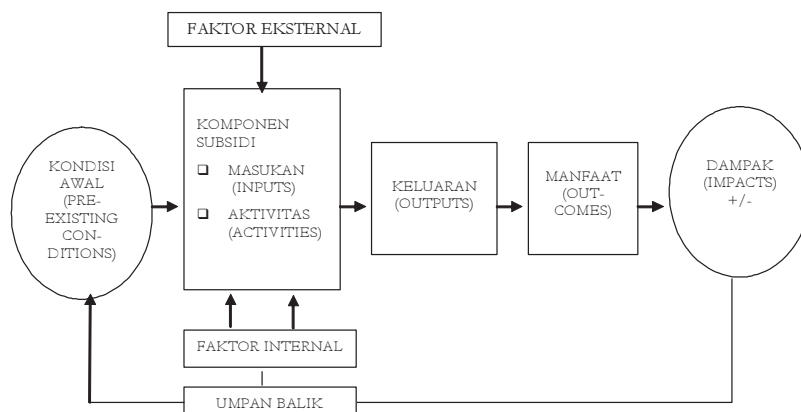
Tujuan penelitian adalah: (1) Teridentifikasinya implementasi kebijakan P2FM di lapangan, baik proses pelaksanaan maupun kinerja pelaku program; (2) Teridentifikasinya faktor yang mempengaruhi pelaksanaan P2FM; (3) Teridentifikasinya hasil capaian P2FM; dan (4) Teridentifikasinya tingkat efektivitas dan efisiensi P2FM. Manfaat yang diharapkan adalah

sebagai masukan unit teknis terkait dalam penanganan fakir miskin, sebagai bahan referensi bagi pengembangan program pemberdayaan fakir miskin, dan sebagai bahan referensi dalam studi yang berkaitan dengan program pemberdayaan fakir miskin

Metodologi Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah evaluatif, yang menggunakan pendekatan *System & Model for Delineating Program Elements in The Evaluation Process* (Shortell & Richardson, 1978), yang meliputi: kondisi awal, masukan (*inputs*), proses (*processes*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*). Teknik penilaian dilakukan secara *Rapid Appraisal Methods*.

Kerangka penelitian yang digunakan dapat diilustrasikan seperti pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1: Kerangka Pikir Studi

Kriteria evaluasi sumatif didasarkan pada perbandingan *outputs* dengan *inputs*. Sedangkan kriteria evaluasi formatif didasarkan pada tingkat korespondensi *outputs* dan *outcomes* yang diperoleh atau *impacts* yang terjadi. Evaluasi tujuan dimaksudkan untuk membandingkan pencapaian tujuan dengan tujuan yang diharapkan dan tidak terbatas hanya pada tujuan proyek semata, namun dikaji secara lebih luas dalam konteks besaran masalah, termasuk penurunan persentase dan proporsi penduduk miskin.

Hasil identifikasi aspek-aspek studi dikembangkan dalam bentuk tabel *Logical Framework Analysis*, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Dimensi dan Indikator Aspek-aspek Studi

Dimensi	Indikator	Cara dan Sumber Data
Kondisi Awal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Populasi fakir miskin ▪ Kondisi fakir miskin ▪ Kebijakan dan program P2FM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi dokumentasi kebijakan dan program ▪ Studi dokumentasi hasil penelitian terdahulu ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan program ▪ Wawancara dengan pelaksana program tingkat pusat dan konsultan
Masukan (<i>Inputs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan KUBE ▪ Pembentukan LKM ▪ Bantuan teknis manajemen dan teknis pemberdayaan ▪ Pencairan dana terpenuhi sesuai jadwal ▪ Sosialisasi dan supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan program ▪ Pedoman wawancara bagi pelaksana program pusat dan Satker kabupaten/kota ▪ Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan KUBE dan LKM
Aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan teknis tingkat kabupaten/kota ▪ Penyuluhan sosial ▪ Penyiapan program ▪ Operasionalisasi KUBE/LKM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskusi kelompok terarah (FGD) dengan pengurus dan pengelola kegiatan ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan ▪ FGD dengan pengurus LKM/ KUBE
Keluaran (<i>Outputs</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agenda kegiatan terpenuhi sesuai jadwal yang disusun sendiri oleh warga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan ▪ Wawancara mendalam dengan keluarga fakir miskin penerima bantuan ▪ FGD dengan pengurus KUBE, LKM, dan pengelola kegiatan
Hasil (<i>Outcomes</i>)	<p>Masyarakat semakin memiliki kemampuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengelola KUBE FM ▪ Kemampuan KUBE meningkat ▪ Peningkatan akses KUBE terhadap sumber di sekitarnya. ▪ Peningkatan tanggung jawab anggota KUBE terhadap kelompoknya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan ▪ Wawancara mendalam dengan penerima bantuan ▪ FGD dengan pengurus dan pengelola kegiatan
Manfaat (<i>Benefits</i>)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontribusi Pemkab/Pemkot ▪ Peningkatan kesejahteraan Sosial anggota KUBE ▪ Bertambahnya aset LKM 	
Dampak (<i>Impacts</i>)	<p>Meningkatnya Kesos warga binaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghasilan warga miskin meningkat ▪ Beban konsumsi warga miskin berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Studi dokumentasi laporan kegiatan ▪ Wawancara mendalam dengan penerima bantuan ▪ FGD dengan pengurus dan pengelola kegiatan

Penentuan lokasi berdasarkan keterwakilan wilayah dan jenis usaha. Berdasarkan keterwakilan wilayah meliputi: perkotaan, perdesaan, pinggiran kota, perhutanan, pantai, industri, kepulauan terpencil, perbatasan antar negara, pegunungan, dan bantaran sungai. Berdasarkan jenis usaha KUBE meliputi: perdagangan dan jasa, peternakan, teknologi tepat guna, industri rumah tangga, pertanian, dan perikanan. Penentuan sampel didasarkan pada ratio jumlah fakir miskin dengan jumlah penduduk per provinsi.

Responden penelitian ini adalah Instansi Sosial Provinsi, Instansi Sosial Kabupaten/Kota, Kepala Satuan Kerja P2FM Kabupaten/Kota, Pendamping Pusat di Kabupaten/Kota, Pendamping Daerah, Pengurus Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Anggota KUBE, dan Masyarakat di sekitar kegiatan P2FM

Tujuan penelitian (*item 1 & 2*) digunakan teknik analisis kualitatif, sedang tujuan (*item 3*) digunakan teknik analisis kuantitatif. Uji statistik yang digunakan adalah Willcoxon, dengan pertimbangan sampel berpasangan, skala ordinal, dan desain penelitiannya *pretest – posttest* tanpa kelompok kontrol.

Temuan Penelitian dan Analisis

Pemberdayaan fakir miskin digambarkan dengan pendekatan sistem, yaitu: masukan, proses, keluaran, manfaat, dan dampak. Masukan (*inputs*) pemberdayaan fakir miskin (FM) adalah bantuan ternak sapi, kambing, dan kapal motor senilai Rp. 40 juta tiap kelompok. Beberapa daerah ada bantuan tambahan yang besarnya bervariasi, digunakan untuk pembuatan kandang, tambahan pakan, pengobatan, dan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28,3 % anggota KUBE mengatakan bahwa bantuan kurang sesuai dengan kebutuhan, namun 71,7 % mengatakan sesuai dengan kebutuhan. Sosialisasi program dinyatakan kurang dilakukan, bahkan ada yang tidak sama sekali. Pendampingan difasilitasi melalui anggaran APBN dan APBD.

Proses pemberdayaan FM menunjukkan bahwa 85,8 % anggota KUBE terlebih dahulu diberikan pelatihan sebelum bantuan diberikan. Pelatihan berkaitan dengan keterampilan teknis pengelolaan KUBE, pemeliharaan sapi, kambing, dan kapal motor. Penyaluran bantuan sangat tergantung pada daerah masing-masing. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Riau, bantuan diberikan dalam bentuk uang, yang

terlebih dahulu dimasukkan dalam rekening BRI, kemudian masing-masing anggota diberi wewenang untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan proposal yang mereka usulkan, misalnya: sapi untuk Jateng dan NTT, sedang kapal motor untuk Riau. Pengelolaan dilakukan secara terbuka dan dilakukan atas kesepakatan bersama, tidak bisa hanya dilakukan secara sepihak oleh pengurus atau ketua. Dalam pemberdayaan FM, pendamping banyak berperan, namun tidak mendapatkan pelatihan, sehingga hanya mengandalkan pengalaman semata.

Keluaran (*Output*) yang dihasilkan dari pemberdayaan FM adalah meningkatnya perkembangan KUBE. Dari 8 wilayah yang diteliti, 5 wilayah, yaitu: Jateng, Sumbar, Jatim, NTT, dan Riau mengalami perkembangan yang menggembirakan, walaupun baru aspek nonekonomi, seperti: fisik ternak semakin besar, kesehatan membaik, dan jumlah ternak bertambah (sapi dan kambing beranak). Dari aspek ekonomi perkembangannya belum menggembirakan, sehingga banyak anggota KUBE mengeluarkan biaya untuk perawatan kesehatan ternak (obat-obatan) dan pemberian pakan tambahan.

Hasil pengujian dengan *Kruskal-Wallis* menunjukkan bahwa beberapa KUBE mengalami perkembangan yang cukup berarti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa t hitung *Chi Square* untuk variabel *perkembangan usaha KUBE* dan variabel *manfaat perkembangan usaha yang dirasakan anggota* lebih besar dari t tabel, masing-masing sebesar 49,001 pada df 7 dan 72,165 pada df 7, sedangkan t tabel hanya 14,07 pada df 7. Bila dilihat dari TS kedua variabel memiliki TS sebesar 0,000 pada pengujian 0,05. Rumus statistik mengatakan, ada perbedaan keberhasilan bila t hitung lebih besar dari t tabel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel. Ini berarti ada perbedaan keberhasilan di antara kelompok KUBE yang dijadikan sampel penelitian dilihat dari wilayah (provinsi) penelitian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat (*outcome*) secara ekonomis belum dapat dirasakan, tetapi secara nonekonomis sangat dirasakan oleh anggota KUBE. Para anggota KUBE dan masyarakat setempat menilai kotoran sapi mempunyai banyak manfaat, khususnya untuk pupuk tanaman. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak (*impact*) pemberdayaan FM belum terlihat, misalnya belum ada peningkatan pendidikan anak, perbaikan rumah, dan kesejahteraan anggota keluarga.

Analisis SWOT menunjukkan ada berbagai kekuatan (*strengths*) yang dapat digunakan untuk pemberdayaan FM, misalnya: (1) pengalaman anggota KUBE dalam pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan; (2) sumber daya alam (rumpun dan air) cukup tersedia dan sumber sosial (rasa kebersamaan dan dukungan masyarakat) cukup tinggi; (3) bantuan modal yang diberikan bila disatukan akan menjadi modal yang kuat; (4) terpeliharanya budaya kerja sama dan gotong royong anggota KUBE, khususnya dalam pembuatan kandang, pengambilan rumput, dan memandikan sapi; (5) pengelolaan jenis usaha yang bersifat individu dan kelompok, namun pembinaan tetap dalam kelompok; (6) perasaan tenang anggota KUBE karena ada harapan hidup lebih baik dari modal ternak yang dimiliki; (7) status sosial anggota KUBE meningkat karena memiliki ternak.

Kelemahan (*weakness*) yang dimiliki adalah: (1) bantuan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan; (2) pelatihan yang diadakan sangat terbatas dan kurang menyentuh substansi; (3) jenis usaha dalam kelompok harus sejenis, sehingga menyulitkan anggota KUBE yang punya pengalaman dan latar belakang pekerjaan berbeda; (4) perbedaan pendapat dalam kelompok, khususnya dalam pengelolaan ternak secara individu atau kelompok; (5) beberapa jenis dan pengelolaan usaha kurang berkembang; (6) keberhasilan yang diharapkan kurang memadai dengan harapan, keinginan, dan kebutuhan hidup keluarga; (7) beberapa ternak sapi yang diberikan kualitasnya kurang bagus, sehingga ada beberapa KUBE yang harus mengganti bibit ternak yang diberikan dengan bibit ternak ekspor yang kualitasnya sangat bagus. Untuk ini mereka harus mengeluarkan sejumlah uang tambahan untuk membelinya.

Peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan FM adalah: (1) bantuan modal yang diberikan oleh Departemen Sosial; (2) dukungan dana pendampingan yang disediakan oleh pemerintah daerah; (3) kesempatan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah daerah, baik terhadap anggota KUBE maupun pendamping; (4) adanya pendampingan, walaupun waktunya terbatas; (5) hasil atau produksi yang semakin baik, khususnya ternak yang dipelihara semakin besar, sehat, dan beranak; (6) Pemerintah memberikan dana tambahan bagi pengelolaan usaha yang berhasil; (7) adanya kerja sama dengan instansi/lembaga terkait dalam pemeliharaan ternak, seperti: pemeliharaan kesehatan, penyediaan pakan tambahan, dan lain-lain

Tantangan (*threats*) yang dihadapi dalam pemberdayaan FM adalah: (1) bantuan yang diterima tidak utuh dan diadakan melalui pihak ke tiga; (2) pelayanan pendampingan kurang profesional, karena pelatihannya sangat terbatas dan hampir tidak ada; (3) adanya kepentingan-kepentingan dari luar yang turut campur dalam pengelolaan sebagian KUBE; (4) sebagian anggota kurang mampu memanfaatkan bantuan; (5) sebagian ternak sapi sudah layak dijual, namun pemasarannya sulit dilakukan; (6) beberapa wilayah rawan pencurian, sehingga harus piket setiap malam secara bergantian.

Rekomendasi

Ada dua alternatif model pemberdayaan yang direkomendasikan, yaitu:

A. ALTERNATIF 1

1. Pra Persiapan

Tahap ini meliputi sosialisasi program dan seleksi calon WBS, termasuk pendamping. Sosialisasi disampaikan kepada beberapa kelompok sasaran, seperti: aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, warga secara umum, dan kelompok calon sasaran agar mereka mengetahui program yang dicanangkan. Selain itu perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti: Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Peternakan, dan dinas/instansi lainnya. Selanjutnya dilakukan seleksi terhadap calon WBS dan pendamping dengan kriteria yang jelas dan dilaksanakan secara obyektif.

2. Persiapan

a. Need Assessment

Sebelum pemberdayaan dilakukan, perlu diketahui kebutuhan kelompok sasaran. Kebutuhan ini terkait dengan jenis usaha yang dikembangkan. Secara konseptual, ada jenis usaha yang bersifat harian, semesteran, dan tahunan. Pemilihan jenis usaha harus sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Jenis usaha ternak sapi, kerbau, dan kambing ternyata tidak cocok diberikan kepada kelompok fakir miskin, karena persoalan mereka adalah bagaimana makan hari ini. Jenis usaha ternak baru menghasilkan setelah 1-2 tahun.

b. Pembentukan Kelompok

Pengelolaan jenis usaha dilakukan oleh kelompok, sehingga pembentukan kelompok merupakan faktor krusial. Pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan tempat tinggal agar tidak berjauhan, jenis usaha yang dikembangkan, dan asal daerah. Intinya adalah adanya kesepakatan dan saling menerima di antara anggota kelompok.

c. Pelatihan WBS dan Pendamping

Sasaran pelatihan ada dua, yaitu para WBS penerima bantuan dan para pendamping. Sebelum bantuan diberikan, para WBS diberi pelatihan yang terkait dengan *substansi jenis usaha* yang dikembangkan. Bila jenis usaha yang dikembangkan adalah dagang maka substansi pelatihan adalah tentang manajemen bagaimana cara mengelola usaha, cara menjual, menetapkan harga, menghitung keuntungan, cara mengemas, cara memasarkan, dan lain-lain yang terkait dengan usaha jualan. Selain materi substansi, juga perlu materi *pengembangan komitmen*, agar tumbuh motivasi, kemauan, dan semangat kerja keras dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Demikian juga dengan pendamping, mereka perlu diberi pelatihan yang terkait dengan *substansi jenis usaha* yang dikembangkan oleh KUBE binaannya. Materinya meliputi manajemen pengelolaan KUBE, pengembangan jenis usaha, pengguliran bantuan, supervisi, hingga cara mengevaluasi. Pendamping juga diberi materi *pengembangan komitmen*, karena banyak pendamping kurang serius dalam menjalankan tugasnya.

d. Pemberian Modal Sesuai Kebutuhan

Pemberian modal disesuaikan dengan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi agar usaha dapat dioperasikan. Jangan sampai bantuan yang diberikan tidak bisa dioperasikan, karena bagian dari peralatan tidak lengkap. Bantuan hendaknya diberikan dalam bentuk uang dan para WBS diminta mengajukan proposal sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan mereka. Pendamping membantu mengarahkan pengadaan atau pembelian jenis usaha yang akan direalisasikan. Bila bantuan

barang yang diberikan, banyak hal yang menjadi persoalan, seperti *spesifikasi* dan jenisnya kurang sesuai. Bantuan uang lebih tepat, tetapi pengawasan harus lebih ketat dan tepat, baik pengawasan dari pendamping maupun pengawasan fungsional dari pihak pemerintah terkait.

3. Pelaksanaan dan Pengembangan

a. Pengelolaan Individu dan Kelompok

Banyak polemik yang timbul tentang pendekatan pengelolaan. Ada yang mengatakan pengelolaan usaha harus dilakukan dalam kelompok, tetapi ada juga yang mengatakan lebih baik secara individu, karena tanggung jawabnya jelas. Kedua pendekatan ini dapat dilakukan tergantung pada jenis usaha yang dikembangkan. Bila jenis usahanya adalah koperasi simpan pinjam, koperasi usaha dagang, atau warung nasi yang sudah besar, pengelolaan dapat melalui kelompok, tetapi bila jenis usahanya adalah jualan gorengan kecil-kecilan, warung kopi atau super mie, maka pengelolaan lebih baik secara individu, tetapi pembinaan tetap dalam kelompok. Jenis usaha yang dikembangkan tidak perlu harus satu jenis, tetapi dapat terdiri dari beberapa jenis, yang penting masing-masing anggota terikat dalam IKS dan kegiatan kelompok.

b. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha dapat dilakukan dari segi inovasi maupun pengembangan jaringan. Inovasi dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, efisiensi, dan efektivitas waktu. Jaringan kerja dikembangkan mulai dari awal hingga akhir. Sangat baik bila membangun jaringan dalam penyediaan bibit unggul dengan pihak perkebunan dan dengan pengusaha dalam pemasaran hasil. Pengembangan usaha tidak hanya satu jenis, tetapi berbagai jenis usaha sekaligus.

c. Penguatan Modal

Bagi kelompok atau individu yang sudah berhasil perlu diberi *reward* agar lebih termotivasi. Dalam pengembangan usaha diperlukan modal tambahan untuk perluasan usaha. Penguatan modal dapat dilakukan melalui pemberian modal tambahan, tetapi perlu didukung dengan pelatihan yang efektif.

d. Pendampingan

Anggota KUBE umumnya berpendidikan rendah, keterampilan kurang, dan wawasan sederhana. Sedang pelatihan yang diberikan sangat terbatas. Untuk itu dibutuhkan pendampingan. Pendamping harus profesional dan ahli di bidang yang didampingi. Pendamping dapat berasal dari daerah setempat atau luar wilayah. Inti pendampingan adalah memfasilitasi kelompok sasaran agar usaha yang dikembangkan menjadi lancar dan berkembang.

e. Pengguliran

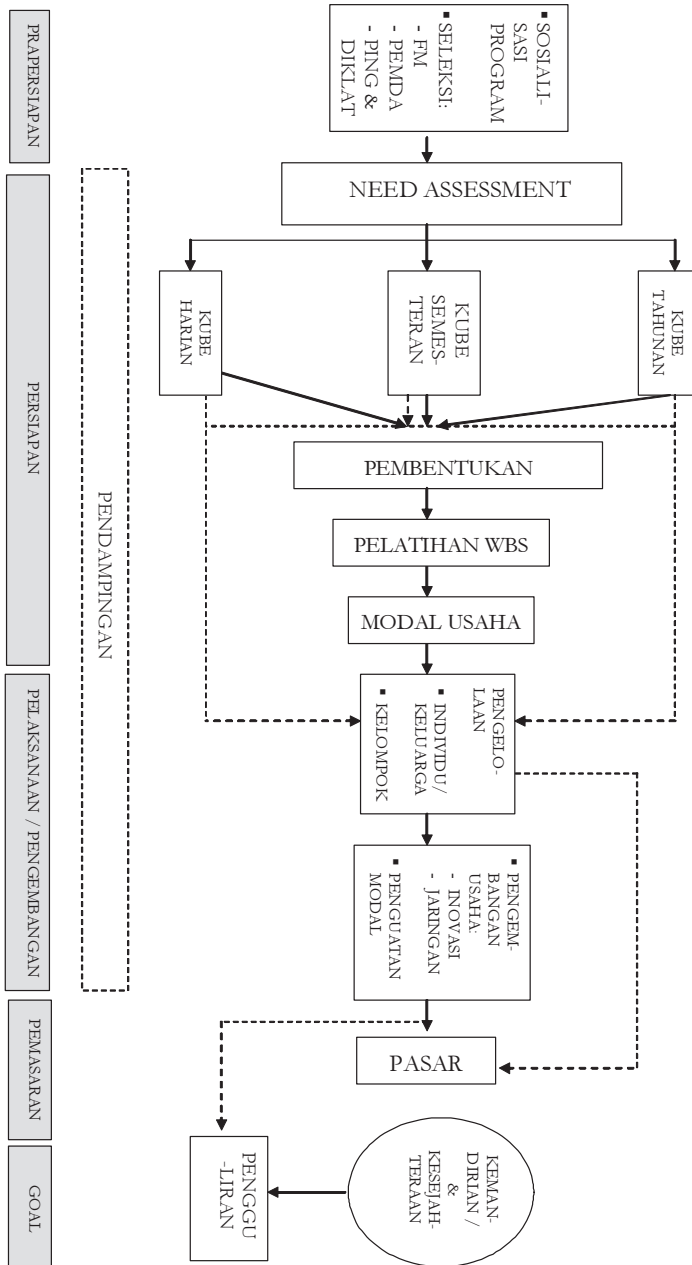
Pengguliran dilakukan kepada kelompok lain yang membutuhkan. Pengguliran merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab, dan kesetiakawanan sosial. Besarnya bantuan dan waktu pengguliran ditentukan oleh masing-masing kelompok. Bantuan yang diberikan tidak perlu dikembalikan kepada pemerintah, tetapi digulirkan pada warga masyarakat yang belum mendapat bantuan.

4. Pemasaran

Pengelolaan usaha tanpa pemasaran tidak berarti apa-apa. Produk yang sudah dihasilkan harus dipasarkan agar mendapat keuntungan. Sebelum jenis usaha ditentukan perlu pertimbangan pangsa pasarnya. Pasar adalah wahana transaksi dari seorang atau sekelompok orang yang mau membeli produk yang dihasilkan KUBE. Pasar di sini dapat berupa warung-warung yang ada di pinggir jalan, pembeli yang memesan melalui telepon, pembeli yang datang ke tempat produksi, dan lain-lain.

5. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan harus dapat mewujudkan *kemandirian berusaha*, artinya tidak lagi tergantung pada pihak lain dan membantu pengelolaan KUBE lain. Pencapaian tujuan diharapkan berdampak baik terhadap keluarga, seperti: keberhasilan dalam pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, aktualisasi diri, dan sebagainya.



Gambar 1: Model Pemberdayaan

B. ALTERNATIF 2

Sebelum pemberdayaan terhadap fakir miskin dilaksanakan, terlebih dahulu perlu dilakukan uji coba pada sebuah laboratorium kesejahteraan sosial. Laboratorium ini merupakan wahana untuk mengembangkan berbagai teknologi sosial agar taraf kesejahteraan sosial masyarakat meningkat. Teknologi sosial tersebut lebih mengarah pada teknik perubahan perilaku individu maupun masyarakat untuk tahu, mau, dan mampu. Untuk langkah awal, laboratorium yang dikembangkan adalah penciptaan teknologi penanganan kemiskinan.

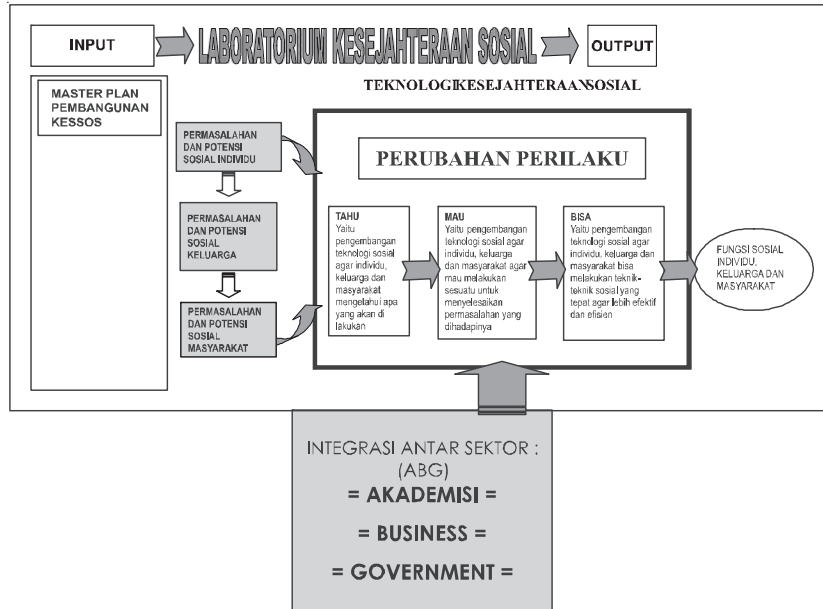
Input laboratorium kesejahteraan sosial adalah permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, baik permasalahan individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Permasalahan kemiskinan yang menjadi *concern* adalah budaya kemiskinan, di mana masyarakat merasa miskin walaupun kalau dilihat dari indikator kemiskinan tidak tergolong miskin.

Permasalahan diproses dalam laboratorium untuk diciptakan teknologi sosial yang mampu mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi tersebut diharapkan dapat mengubah tingkah laku individu, keluarga, dan masyarakat menjadi TAHU, MAU dan MAMPU. Tahu artinya masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mau artinya masyarakat bersedia melakukan cara keluar dari kemiskinan tersebut. Mampu atau bisa artinya masyarakat dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan pihak lain.

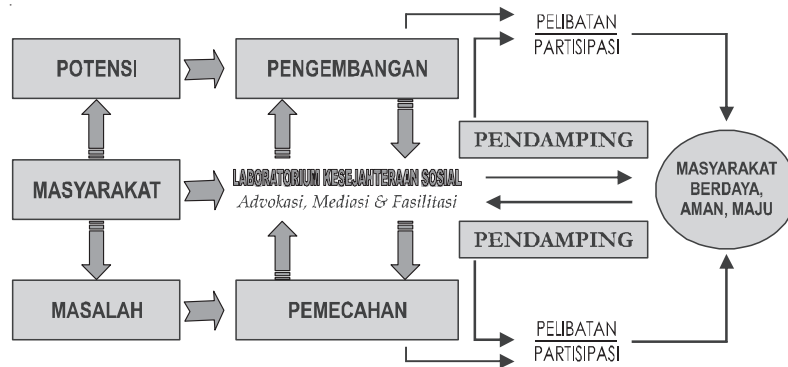
Output laboratorium kesejahteraan sosial adalah keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Inilah indikator kesejahteraan sosial yang akan dibangun. Dalam laboratorium kesejahteraan sosial perlu dibuat *master plan* pembangunan kesejahteraan sosial agar dapat terarah dan terencana dengan baik

Laboratorium kesejahteraan sosial ini dirancang dengan alur pikir (*logical framework*) sebagai berikut :

Implementasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin



Sedangkan dalam penelitian dan pengembangannya, laboratorium kesejahteraan sosial dirancang dengan menggunakan metode eksperimen dengan alur pikir (*logical framework*) sebagai berikut :



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Departemen Sosial RI, (2004), *Faktor-Faktor Penghambat Perkembangan Potensi Sosial Masyarakat Lokal di Daerah Miskin*, Jakarta: Pusbangtansosmas
- Hikmat, Harry. (2001). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003), *Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Sekretariat KPK
- Pranarka, A.M.W. & Moeljarto, Vindyandika. (1996). *Pemberdayaan (Empowerment). Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and Intenational Studies (CSIS).
- Suharto, Edi (2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat - Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: PT Refika Aditama